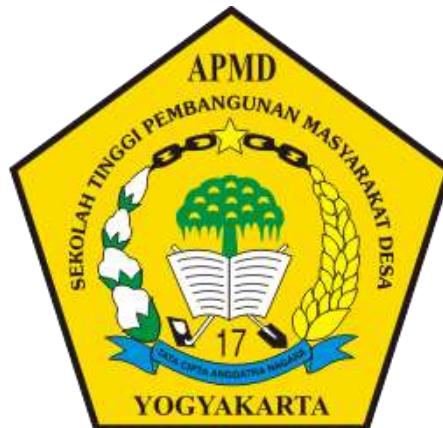


**COLLABORATIVE GOVERNANCE: PENGELOLAAN DESA WISATA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGLI KABUPATEN
BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

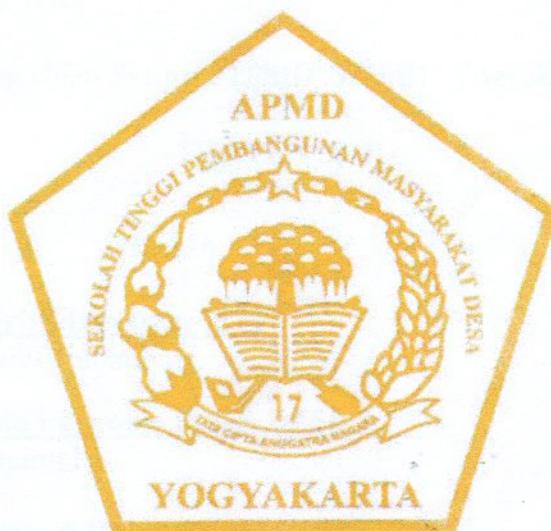
**Gideon Pawa Salombe
19520145**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE: PENGELOLAAN DESA WISATA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

**Gideon Pawa Salombe
19520145**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Mei 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gideon Pawa Salombe

NIM : 19520145

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance: Pengelolaan Desa Wisata Di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2023



Gideon Pawa Salombe
19520145

MOTTO

**“Kalau Yang Kamu Lakukan Hari Ini Adalah Bukan Keinginan Mu
Tapi Keinginan Orang Tua Mu, Lakukanlah Itu Sebagai Bentuk
Tanggung Jawabmu Atas Ekspektasi Kedua Orang Tua Mu”**

(Dion)

**“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh
Allah diam di dalam kamu?”**

(1 Korintus 3: 16)

**“Kalau Yang Kamu Lakukan Hari Ini Adalah Untuk Kebahagiaan
Orang Tua Mu, Kamu Juga Harus Melakukannya Dengan Ikhlas Dan
Tersenyum”**

(Dion)

**“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku”**

(Filipi 4: 13)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan, serta memberikan kekuatan sehingga saya dapat bertumbuh hingga saat ini:

1. Dengan segala ucapan Syukur saya persembahkan Kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga sampai pada saat ini masih bisa menikmati berkat-Nya yang tidak pernah ada habis-habisnya. Terimakasih Tuhan Yesus atas segala Berkat dan Kasih setiaMu. Tuhan Yesus ku luar biasa.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kedua orang tuaku. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Drs. Simon Salombe, M.Si dan Mama Martina Bura Pawa telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untukku. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan yang selalu diberikan kepadaku. Doakan anak ganteng mu ini semoga dapat selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita.
3. Terimakasih juga untuk kakak perempuan ku Fikarisma Daeng Salombe, S.S yang seringkali mendukung ku dengan doa serta uang yang sering kau kirimkan saat aku sedang tidak punya uang dan malu untuk meminta kepada bapak dan mama.
4. Terimakasih juga saya ingin berikan kepada dosen pembimbing ku Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga saya ingin berterimakasih kepada para dosen penguji saya yang telah bersedia menguji skripsi ini

dan memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi ini yaitu Pak Drs. Triyanto Purnomo R. BE. M.S sebagai dosen penguji samping I (satu) dan Pak Analius Giawa, S.IP., M.Si sebagai dosen penguji samping II (dua).

5. Terimakasih juga saya ingin sampaikan kepada seluruh Dosen STPMD “APM” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pendidikan akademik selama kami menempuh studi di kampus desa yang luar biasa ini STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.
6. Terimakasih juga untuk kekasihku Either Toding dan seluruh teman-teman saya yang selama ini selalu ada di saat suka maupun duka yang telah kita lalui bersama-sama, dukungan dan semangat dari kalian sangat berharga untukku, khususnya kepada Timotius, Erick, Eti, Filla, Yoga, Afner, Zefora, Ros, dan Seluruh Anggota asrama APMKT “BANUA ETAM” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE: PENGELOLAAN DESA WISATA DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOHIR KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*”. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Secara substansial skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang *collaborative governance* yang terjadi dalam pengelolaan sebuah desa wisata yang ada di Kalurahan Wukirsari. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, keterbatasan, baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam berfikir dan menulis. Maka dari itu apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikannya sendiri untuk itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Triyanto Purnomo R. BE. M.S selaku penguji samping I (satu) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku penguji samping II (dua) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan dari awal perkuliahan dan membantu menyelesaikan masalah perkuliahan selama berkuliah di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu Dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Wukirsari, pengelola Desa Wisata Wukirsari, dan masyarakat Kalurahan Wukirsari yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. <i>Literature Review</i>	9
G. Kerangka Konseptual.....	16
1. Governance.....	16
2. Desa Wisata.....	18
3. <i>Collaborative Governance</i>	22
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3. Obyek Penelitian.....	28
4. Subyek Penelitian.....	28

5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
a. Observasi.....	30
b. Wawancara.....	31
c. Dokumentasi.....	32
6. Teknik Analisis Data.....	33
a. Reduksi Data.....	33
b. Penyajian Data.....	34
c. Penarikan Kesimpulan.....	34
BAB II DESKRIPSI UMUM KALURAHAN WUKIRSARI.....	35
A. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari.....	35
B. Deskripsi Desa Wisata Wukirsari.....	42
C. Destinasi/Potensi Desa Wisata Wukirsari.....	43
D. Fasilitas/Sarana dan Prasaran Desa Wisata Wukirsari.....	48
E. Tujuan Desa Wisata Wukirsari.....	51
F. Pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.....	51
G. Kolaborasi dan Sinergi.....	57
H. Prestasi Desa Wisata Wukirsari.....	58
BAB III ANALISIS PERAN AKTOR DAN <i>PROCESS COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA WUKIRSARI...	59
A. Analisis Peran Aktor Dalam Pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.....	59
B. Analisis <i>Process Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.....	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Deskripsi Informan Secara Umum.....	29
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Padukuhan di Kalurahan Wukirsari.....	36
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	38
Tabel 2.3. Jumlah penduduk Berdasarkan Agama.....	39
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	40
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	41
Tabel 2.6. Program Kerja Pokdarwis Wukirsari.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Teknik Analisis Data.....	33
Gambar 2.1. Peta Perbatasan Kalurahan Wukirsari.....	38
Gambar 2.2. Kampung Batik Giriloyo.....	44
Gambar 2.3. Air Terjun Sewu.....	45
Gambar 2.4. Situs Makam Raja-raja Mataram.....	45
Gambar 2.5. Bentuk Kerajinan Yang Ada Di Wukirsari.....	46
Gambar 2.6. Pasar Sor Jati Di Desa Wisata Wukirsari.....	47
Gambar 2.7. <i>Homestay</i> Yang Ada Di Desa Wisata Wukirsari.....	49
Gambar 2.8. Fasilitas Jalan dan Taman Parkir Di Desa Wisata Wukirsari.....	49
Gambar 2.9. Tempat Beribadah Di Desa Wisata Wukirsari.....	50
Gambar 2.10. Penetapan Pokdarwis Melalui Keputusan Gubernur DIY.....	53
Gambar 3.1. APBKal Wukirsari Tahun 2023 Tentang Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.....	64
Gambar 3.2. APBKal Wukirsari tahun 2023 Tentang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasaran Pariwisata Milik...	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara.....	101
Lampiran 2.1.	Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	104
Lampiran 2.2.	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	105
Lampiran 2.3.	Surat Tugas Penelitian.....	106
Lampiran 2.4.	Surat Izin Penelitian Kalurahan.....	107
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian.....	108

INTISARI

Skripsi ini membahas proses *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Spesifikasi destinasi wisata batik dan wayang kulit yang ada di Desa Wisata Wukirsari dipilih karena cikal bakal munculnya proses *collaborative governance* di Kalurahan Wukirsari diawali dari pemberdayaan kelompok pengrajin batik dan wayang kulit dan juga kedua destinasi ini merupakan destinasi yang saat ini sudah mulai berkembang pasca terjadinya pandemi covid-19. Munculnya kelompok pengrajin batik dan wayang kulit setidaknya berperan vital dalam menjadikan Kalurahan Wukirsari sebagai desa wisata.

Skripsi ini terfokus pada bagaimana peran setiap aktor dalam pengelolaan desa wisata Wukirsari sekaligus terjadinya proses *collaborative governance* di Kalurahan Wukirsari. Skripsi ini menggunakan model *process collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell and Gash (2007:558 -561) dalam mengetahui interaksi yang terjadi oleh setiap aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Terdapat 5 indikator yakni, *Face to Face Dialog, Commitment to Process, Trust Buliding, Shared Understanding, Intermediate Outcomes*.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *eksploratif*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek pada penelitian ini berjumlah 11 narasumber yang termuat dalam Pemerintah Kalurahan Wukirsari, pengurus Pokdarwis, pengurus paguyuban, dan masyarakat. penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *procedure purposive* untuk menentukan informan yang dianggap relevan dalam memberikan informasi.

Pemerintah Kalurahan Wukirsari berperan dengan menyediakan lokasi untuk destinasi wisata dari tanah kas desa, membuat regulasi dan narahubung masarakat dengan swasta, mengalokasikan APBKal untuk pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Pihak swasta berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari melakukan perannya dengan memberikan bantuan berupa pembangunan fisik dan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk pengembangan Desa Wisata Wukirsari. Masyarakat Wukirsari dalam pengelolaan Desa wisata Wukirsari sendiri berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.

Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat indikator dalam proses *collaborative governance* yang tidak tercapai yaitu *commitment to the process* dan *shared understanding* dikarenakan tidak adanya komitmen oleh aktor swasta yang terlibat dan kurangnya se-pemahaman visi oleh aktor yang ada.

Kata Kunci: Desa Wisata, *Collaborative Governance*, Pengelolaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang yang potensial dalam pembangunan negara adalah pariwisata. Karena, pariwisata diyakini dapat memberikan dampak positif sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Desa yang memiliki potensi wisata dapat menghidupkan perekonomian masyarakat dengan hadirnya usaha mikro kecil dan menengah dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Bahkan, dapat menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan kembali oleh desa untuk melakukan pembangunan desa yang tujuannya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan pariwisata di desa memberikan julukan baru kepada desa dengan potensi wisata yaitu desa wisata. Berbicara mengenai desa wisata, kita perlu mengetahui fakta yang terjadi di lapangan adalah desa wisata atau hanya aktivitas wisata di desa. Perdebatan mengenai desa wisata dan wisata di desa menjadi hal yang perlu dijawab sebelum lebih dalam membahas mengenai apa yang terjadi di Desa Wisata Wukirsari.

Selama ini fakta yang terjadi di Desa Wisata Wukirsari hanya aktivitas wisata di desa atau sudah berjalan sebagai desa wisata? Desa wisata berarti kegiatan wisata yang dilakukan pada obyek wisata desa. Dengan adanya desa wisata diharapkan menjadi jalan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa agar menjadi pelaku pariwisata dan memaksimalkan potensi yang ada di desa. Sebagai suatu desa wisata semestinya kita dapat melihat

kewenangan desa dalam mengatur, mengurus dan melayani dalam aktivitas desa wisata ini. Sementara, wisata di desa hanya merupakan suatu bentuk kawasan wisata yang ada di desa yang menawarkan suasana pedesaan tanpa memiliki keterkaitan dengan masyarakat desa yang seharusnya bergerak sebagai pelaku pariwisata di desa tersebut. Desa wisata menjadikan suatu desa bukan hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang mempunyai kewenangan di dalamnya, sedangkan wisata di desa hanya menjadikan desa sebagai suatu obyek tempat berwisata.

Hadirnya desa wisata di Wukirsari memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan bagi masyarakat. Hal ini diucapkan oleh ibu Sekar salah seorang masyarakat yang menjadi pengurus dari ‘Paguyuban Batik Giriloyo’ yang ada di Desa Wisata Wukirsari. Sejak dahulu masyarakat di kaki Bukit ‘Bukti Bego’ sudah menjadi pembatik bagi keraton yang ada di Yogyakarta, namun dulu nya masyarakat di sana hanya menjadi penulis batik yang kemudian dikirim hasilnya ke Keraton Yogyakarta untuk diwarnai disana.

Hal itu menyebabkan masyarakat di sini hanya mahir dalam hal menulis batik dan belum mampu dalam pewarnaan batik. Hingga pada saat musibah letusan Gunung Merapi tahun 2006 yang mengguncangkan hampir seluruh daerah di Yogyakarta berdampak pada kampung ini. Setelah letusan Gunung Merapi banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan pemerintah yang masuk untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga kampung itu. Mereka diajarkan untuk membatik sampai pada tahap

pewarnaan, yang kemudian kelompok-kelompok batik itu terus berkembang dan hingga saat ini menjadi Kampung Batik Giriloyo.

Sejak ditetapkannya Kalurahan Wukirsari menjadi desa wisata, banyak bantuan-bantuan yang didapat oleh paguyuban-paguyuban pembatik dan pengrajin wayang kulit. Hal itu berupa pembangunan fisik yang berdampak pada perkembangan wisata di sana, seperti pembangunan *showroom* batik, joglo, dan *showroom* untuk wayang kulit. Selain itu, desa wisata Wukirsari juga mendapatkan bantuan pelatihan dan pengembangan untuk mengelola potensi yang ada pada desa wisata Wukirsari. Hal ini tentunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat, Desa Wisata Wukirsari juga menjadi salah satu desa wisata dengan cukup banyak penghargaan yang sudah diraih, yaitu: pemecah rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) selendang batik terpanjangan pada tahun 2007, juara III (tiga) desa wisata DIY tahun 2014, peringkat 75 terbaik ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) tahun 2023, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) Awards untuk *homestay* Adiluhung tahun 2016, peringkat VI (enam) dan V (lima) untuk Pokdarwis Nasional pada tahun 2016 dan 2017, dan lain-lainnya.

Dari berbagai penghargaan serta prestasi yang telah diraih oleh Desa Wisata Wukirsari tentunya keterlibatan setiap aktor dan hubungan antar lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan dengan baik. Sesungguhnya keterlibatan setiap aktor dan hubungan antar lembaga yang baik tersebut

terdapat sebuah kolaborasi yang dijaga oleh setiap aktor yang berperan di dalamnya sehingga menarik untuk melihat bagaimana *collaborative governance* yang terjadi pada Desa Wisata Wukirsari.

Kajian ini akan menggunakan perspektif *governance* dalam melihat kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Interaksi antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat yang secara khusus merupakan suatu bentuk kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Hal tersebut merupakan wujud *governance*, yaitu interaksi antara negara-pemerintah dengan swasta dan masyarakat. *Governance* menunjukkan "Diseminasi Kekuasaan" dari aktor tunggal menjadi *multi* aktor.

Pada konsep *governance*, kepentingan publik yang awalnya pengelolaan dilakukan oleh aktor tunggal yang dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian menjadi pengelolaan bersama dengan beberapa *stakeholder*, yaitu masyarakat dan swasta. Maka dari itu *governance* membuat peran pemerintah tidak lagi dominan dan membentuk suatu demokrasi pada pengelolaan desa wisata.

Kalurahan Wukirsari adalah desa wisata yang menunjukkan adanya suatu bentuk *collaborative governance*. Dengan adanya hubungan pemerintah (Pemerintah Kalurahan Wukirsari), masyarakat (pengrajin batik, wayang kulit, Pokdarwis, pengelola desa wisata, karang taruna, dan kelompok paguyuban) serta aktor swasta.

Peran pemerintah sebagai *fasilitator* dan masyarakat bergerak sebagai pelaku wisata. Sementara itu pihak swasta berperan sebagai mitra yang membantu dalam mengatasi permasalahan dalam pengembangan desa wisata

dan juga penggerak yang menggerakkan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, swasta disini juga berperan dalam memberikan bantuan-bantuan pembangunan fisik.

Studi mengenai *collaborative governance* menarik untuk dikaji karena pada dasarnya *collaborative governance* menjelaskan bahwa pada saat menangani, mengelola, dan menata suatu masalah *public*, sangat dibutuhkan keterlibatan aktor-aktor non pemerintah lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat lokal atau kelompok paguyuban masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena masalah publik tidak cukup hanya ditangani oleh institusi pemerintah baik secara terpadu maupun terkait. Pendekatan kolaborasi diyakini sebagai jembatan untuk mengembangkan pariwisata. Maka dari itu, La Ode Syaiful (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata di Indonesia pemerintah perlu menerapkan prinsip *collaborative governance*.

Spesifikasi destinasi wisata batik dan wayang kulit yang ada di Kalurahan Wukirsari dipilih karena cikal bakal munculnya proses *collaborative governance* di Kalurahan Wukirsari diawali dari pemberdayaan kelompok pengrajin batik dan wayang kulit dan juga kedua destinasi ini merupakan destinasi yang saat ini sudah mulai berkembang pasca terjadinya pandemi covid-19 . Munculnya kelompok pengrajin batik dan wayang kulit setidaknya berperan vital dalam menjadikan kalurahan Wukirsari sebagai desa wisata. Sedangkan untuk beberapa destinasi lainnya seperti wisata alam air terjun dan wisata kuliner tidak dipilih karena pasca terjadinya pandemi covid-

19 destinasi tersebut belum dimulai kembali aktivitasnya dan untuk wisata situs religi yaitu makam raja-raja tidak dipilih karena lokasi tempat destinasi tersebut masuk kedalam dua wilayah kalurahan yang berbeda sehingga pengelolaan destinasi tersebut tidak menjadi hal diprioritaskan oleh pengelola Desa Wisata Wukirsari.

Penelitian ini menjadi suatu penelitian yang penting untuk dikaji karena penelitian ini memfokuskan pada *process collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari dan bagaimana peran setiap aktor yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari yang ada di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran setiap aktor dan *process collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ?.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi penelitian guna memilih /memilih data relevan dan yang tidak relevan dari banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, penelitian menentukan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran aktor terlibat berdasarkan klasifikasi aktor menurut teori *governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.
2. *Process collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.

D. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Secara Akademik, diharapkan penelitian ini menghasilkan informasi untuk peneliti sejenis mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.

2. Secara Praksis, penelitian ini akan menghasilkan data mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata bagi pemerintah Kalurahan Wukirsari.

E. Manfaat

1. Secara Akademik, Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti lain yang sejenis untuk mengembangkan konsep yang relevan dari aspek yang belum di teliti dari penelitian tentang desa wisata.
2. Secara Praksis, diharapkan manfaat penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Kalurahan Wukirsari tentang kolaborasi pengelolaan desa wisata. Khususnya pemerintah Kalurahan Wukirsari dalam pengelolaan desa wisata di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Literature Review

Pada bagian *literatur review* merupakan tinjauan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hariadi (2019) memfokuskan kajiannya terhadap *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai putih Bira Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai ‘pasir putih Bira’ Kabupaten Bulukumba memiliki dinamika yang masih kurang terlaksana dengan baik walaupun diungkapkan sudah cukup baik karena pihak kelompok sadar wisata terlibat namun kelompok ini tidak terlalu aktif secara kelembagaan, dan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak dengan komitmen mereka menyebabkan komunikasi belum berjalan dengan baik walaupun kolaborasi tersebut sudah diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata. kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan pariwisata merupakan dampak dan adaptasi masyarakat terhadap proses kolaborasi tersebut, hal ini juga membuka peluang pendapatan kepada masyarakat walaupun hal tersebut belum terjadi secara signifikan karena kondisi Pantai Bira yang belum berkembang dengan baik yang dilihat dari SAPTA PESONA di kawasan Pantai Bira yang belum mencapai keseluruhan, dan juga masih ada beberapa tujuan yang masih belum tercapai namun kedua belah pihak yang telah bekerja sama menanggapi hal tersebut sudah cukup. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Hariadi (2019) ini menggunakan

aspek kajian yaitu aspek dinamika, kapasitas, tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi masyarakat yang dapat dijadikan referensi kajian dalam penelitian yang hendak dilakukan ini.

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Kawasan Borobudur melalui program ‘Balai Ekonomi Desa (Balkondes)’ oleh Ardhia dan Kristina (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara *stakeholder* yang melakukan *collaborative governance* dalam program ‘Balkondes’ di Desa Borobudur Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik dilihat dari *Stakeholder* yang sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator kolaborasi dari De Seve. Namun terkait entitas administratif yang dituangkan pada perjanjian kerjasama hanya mengatur antara PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (PT. TWC) selaku BUMN pendamping dan sponsor, dan pemerintah Desa Borobudur melalui BUMDes. Hal tersebut belum menjelaskan terkait keterlibatan PT. Manajemen CBT Nusantara (PT. MCN) yang berperan sebagai pengelola Program Balkondes sehingga semua pihak yang ikut terlibat dalam kolaborasi belum disebutkan oleh *boundary* dan *exclusivity*. Kajian terhadap pengembangan desa wisata melalui program Balkondes dan peran *stakeholder* dan beberapa perusahaan serta BUMDes dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardhia dan Kristina (2020) menambah aspek kajian dalam penelitian yang hendak dilakukan.

Penelitian ini dilakukan oleh Surya, Nofrima, Saputra, dan Nurmiyati (2021) mengenai “*collaborative governance* dalam pengelolaan wisata

berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo dalam studi kasus wisata kebun teh”.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa program pembangunan wisata berkelanjutan merupakan salah satu penerapan *sustainable development goals* guna untuk menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat setempat dalam mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat lokal disana adalah wisata Kebun Teh ‘Nginggo’ Kabupaten Kulon Progo karena tingkat wisatawan yang berkunjung cukup banyak dan karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dijelaskan juga bahwa peran aktor yaitu pemerintah berperan sebagai pemberi bantuan dan dukungan serta mempermudah dengan memberikan alokasi desa atau dana pengembangan. Selain itu pemerintah sebagai inisiator juga berperan dalam pembangunan kawasan desa wisata. Swasta juga turut mengambil peran sebagai wadah pencarian dan pendampingan warga sekitar dalam meningkatkan kerajinan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan mengembangkan hasil industri masyarakat yang memanfaatkan lingkungan pariwisata dalam menyediakan fasilitas pariwisata perkebunan Teh Nglinggo serta mempermudah akses transportasi. Sementara itu peran masyarakat sebagai wadah dalam kegiatan pariwisata agar kondisi antara pengunjung atau wisatawan tetap harmonis, masyarakat setempat dapat bekerjasama dalam wisata budaya dengan manajemen sampai pada pemasaran sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran karena banyak masyarakat yang turut dilibatkan dalam pengelolaanya. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi

untuk penelitian yang hendak dilakukan agar dapat mengkaji secara keseluruhan peran setiap aktor yang berperan dalam kolaborasi.

Penelitian yang dilakukan Dara Kirana & Anggun Artista (2020) memfokuskan pada “Pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di Kota batu”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Batu menggandeng pihak swasta, perguruan tinggi, dan media dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan untuk pengembangan desa wisata di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melakukan pola komunikasi yang intens kepada para pelaku bisnis yang berkaitan dengan program pengembangan pariwisata yang akan dikembangkan dan juga masyarakat yang ada juga dikembangkan melalui kelompok sadar wisata yang ada hal ini dilakukan dalam upaya pengembangan desa wisata di Kota Batu dengan pendekatan *collaborative governance*. Pemerintah Kota Batu menggunakan konsep *collaborative governance* untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor, dengan demikian diharapkan desa wisata dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bahkan pemerintah daerah dalam hal ini meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut terlihat melalui kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata. Diperlukan upaya nyata dari pemerintah daerah untuk menciptakan program kerjasama dalam mengoptimalkan pengembangan desa wisata di Kota Batu dan dapat menarik partisipasi berbagai pihak seperti swasta, masyarakat umum, akademisi dan media sehingga peran setiap aktor tersebut dapat diintegrasikan dalam

pengembangan kawasan desa wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Dara Kirana & Anggun Artista (2020) mengkaji secara normatif dan melihat dampak dari adanya *collaborative governance*, hal ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengkajian dalam penelitian yang hendak dilakukan.

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang oleh Utami, Hariani, dan Sulandari (2021) menunjukkan hasil penelitian yaitu dengan model *collaborative governance* Anshel dan Gash pengembangan desa wisata Kemetul masih belum terlaksana secara maksimal. Kolaborasi ini dipimpin oleh kepala desa dimana dalam pelaksanannya musyawarah merupakan untuk berkomunikasi antar *stakeholders*, sedangkan itu Pokdarwis dan Dinas Pariwisata membantu dalam pemberdayaan masyarakat. Kurangnya kejelasan aturan, komitmen para *stakeholder*, dan pemahaman bersama menjadi kendala pada kolaborasi ini. Terdapat 5 faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pengembangan Desa Wisata Kemetul ini yaitu, (1) kepercayaan antar partisipan, (2) Akses terhadap kekuasaan, (3) Tanggung jawab yang terbagi secara merata, (4) *Shared* informasi, (5) Akses terhadap sumber daya. Sementara itu juga terdapat tiga faktor lainnya yaitu (1) struktur jaringan, (2) komitmen terhadap tujuan, dan (3) tata pengelolaan yang jelas. Kajian yang dilakukan oleh Utami, Hariani, dan Sulandari (2021) yang melihat keberhasilan penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul melalui beberapa faktor dalam teori Anshel dan Gash dapat menjadi referensi dalam penelitian yang hendak dilakukan ini.

Penelitian mengenai *collaborative governance* pengembangan desa wisata Sanankerto dalam meningkatkan ekonomi lokal yang dilakukan oleh Juang Abadi Muhammad (2021) adalah penelitian yang difokuskan pada proses *collaborative governance* dan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan perekonomian lokal di desa wisata Sanankerto. Hasil penelitian menunjukkan manajemen, *aksesibilitas* dan sumberdaya manusia yang masih kurang menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* dan hal tersebut memberikan dampak negatif pada pengelolaan desa wisata Sanankerto. Namun secara keseluruhan dapat dinilai bahwa proses *collaborative governance* berhasil membawa perubahan pada Desa Wisata Sanankerto menjadi lebih baik. Hal tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang menjadi titik awal proses *collaborative governance*. Keberhasilan ini juga memberikan dampak *positif* dalam mengangkat tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Partisipasi warga setempat dan komitmen dari pemerintah setempat dan Kabupaten Malang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Sanankerto ini. Sementara itu, kurangnya sosialisasi paket wisata, regulasi kelembagaan desa wisata yang belum ada menjadi faktor penghambat pelaksanaan *collaborative governance* tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Juang Abadi Muhammad (2021) dalam pengembangan Desa Wisata Sanankerto melalui beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas dapat menjadi referensi dalam penelitian yang hendak dilakukan ini.

Setelah melakukan *literatur review* posisi penelitian yang akan dilakukan (*standing position*) dalam penelitian ini adalah untuk mempertegas pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh Utami, Hariani, dan Sulandari (2021) yang melihat keberhasilan *collaborative governance* melalui beberapa indikator yang dikemukakan oleh Anshel dan Gash. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa penelitian ini memiliki keunikan dalam fokus kajian terkait *collaborative governance* antara pemerintah Kalurahan, paguyuban-paguyuban, Pokdarwis, swasta dan melihat peran setiap aktor yang berperan di dalamnya dan juga melihat *process collaborative governance* pada model yang di kemukakan oleh Anshel dan Gash.

G. Kerangka Konseptual

1. Governance

Desa wisata adalah kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan pariwisata di desa, selain itu kebijakan mengenai desa wisata juga merupakan suatu langkah untuk meningkatkan perekonomian desa dengan hadirnya UMKM dan Peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Desa wisata dijalankan berdasarkan sumberdaya dan potensi yang terdapat pada desa tersebut oleh pemerintah desa dan masyarakat bahkan swasta. sehingga tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu desa wisata.

Governance merupakan suatu bentuk model baru pengelolaan pemerintahan. Tiga hal pokok dalam *governance* yaitu, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu model *government* merupakan model yang digunakan sebelumnya pada pengelolaan pemerintahan dimana pada model ini penyelenggaraan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan pemerintahan yang lebih menunjukan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menunjukan terjadinya pergeseran model pemerintah dari *government* ke arah *governance*. Maka dikembangkan model yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rodhes (Dalam Yuri 2019: 29) menjelaskan konsep *governance*, yaitu pertama, *governance* sebagai *corporate governance*; dimana prinsip pada sektor pribadi dilakukan pada proses penyelenggaraan suatu kegiatan,

transparansi, integritas individu, akuntabilitas yang tinggi, dan peran yang lebih jelas. Untuk menghindari perbedaan antar aktor yang berperan dalam pengelolaan desa wisata maka penguasaan sektor pribadi sangat dihindari dan dalam proses pengelolaan suatu desa wisata transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan perannya oleh setiap aktor menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kedua, *governance* sebagai *the minimal state*; struktur, ukuran, dan peran pemerintah dibuat lebih sederhana untuk membuat proses penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dengan cara melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi, dan memangkas dinas yang dirasa kurang berfungsi. Dalam hal ini pada pengelolaan suatu desa wisata peran pemerintah menjadi lebih sedikit dan tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pengelolaan suatu desa wisata, terdapat institusi lokal yakni Pokdarwis yang mengambil peran dalam pengelolaan desa wisata dengan hubungannya dengan aktor lain yang berperan dalam pengelolaan suatu desa wisata. Sehingga dalam pengambilan kebijakan dalam suatu desa wisata, pemerintah tidak lagi menjadi aktor penentu melainkan setiap aktor memiliki peran dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Pada pengelolaan desa wisata kolaborasi dan tata kelola desa wisata harus berjalan seiringan dan pemerataan kekuasaan. Kooiman dalam Patricia Kennet (2008) menjelaskan bahwa aktor tunggal tidak memiliki ruang untuk berkuasa secara sepahak dalam model *governance*. Dalam menjelaskan mengenai fenomena kolaborasi dalam perspektif *governance* John Gerring dan Storm C. Thacker menjelaskan bahwa ada empat model

governance, yakni: (1) model anarki, yaitu rendahnya kekuatan pemerintah dalam pengambilan keputusan, tingkat demokrasi yang rendah dan penuh dengan konflik, (2) model *sentralistik*, dimana otoritas dalam pengambilan keputusan terpusat dengan tingkat demokrasi nya rendah, (3) model *desentralistik* yaitu kekuatan politik yang rendah namun tingkat demokrasi tinggi, (4) model *sentripetal* yaitu kekuatan yang tinggi politik dalam pengambilan keputusan dan tingkat demokrasi yang sangat tinggi (Gerring & Thacker, 2008).

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *governance* merupakan sebuah tatanan pengelolaan pemerintahan dimana terdapat tiga pokok yang menjadi subjek utama yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. *governance* sendiri merupakan sebuah tatanan baru dalam pengelolaan pemerintahan yang awalnya *government* menjadi satu-satunya penyelenggara pemerintahan yang lebih memfokuskan pada kolaborasi dalam keseimbangan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. dalam penelitian ini juga akan melihat peran setiap aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari dan menjelaskan hasil eksplorasi dari kolaborasi yang terjadi antara pemerintah Kalurahan Wukirsari dengan Pokdarwis serta aktor lainnya menggunakan perspektif *governance*.

2. Desa Wisata

Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana pedesaan dan kehidupan sosial ekonomi, sosial

budaya, adat istiadat dengan ciri khas arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Misalnya atraksi, penginapan, makanan dan minuman, souvenir, dan kebutuhan wisata lainnya. (Priasukmana & Mulyadin, 2001).

Suatu desa dapat dijadikan sebagai desa wisata apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Priasukmana dan Mulyadin, 2001):

- a. Akses menggunakan berbagai jenis *transportasi* yang baik untuk memudahkan wisatawan yang akan berkunjung.
- b. Memiliki potensi sumber daya yang menarik seperti alam, kebudayaan, sejarah, makanan tradisional, dan hal lainnya yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menyambut baik dan mendukung hadirnya desa wisata dan juga wisatawan yang datang berkunjung ke desanya.
- d. Keamanan di desa terjamin.
- e. Fasilitas yang baik, kualitas jaringan yang mendukung, dan tenaga kerja yang berkualitas.
- f. Terjangkau dengan destinasi wisata lainnya yang lebih dulu sudah terkenal di masyarakat luas.

Dari definisi di atas mengenai desa wisata, menyimpulkan bahwa desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang masih memiliki karakteristik

khusus. Hal tersebut antara lain yakni sumber daya alam yang masih terjaga, ciri khas desa, kebudayaan lokal yang dapat dikelola untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Manajemen pelayanan, organisasi, pemasaran strategis, dan sumber daya manusia menjadi hal yang dibutuhkan untuk pengembangan desa wisata. Selaras dengan itu Sumarto (dalam shintan 2020: 30) mengidentifikasi tiga (3) aktor kunci dalam pengelolaan desa wisata, yaitu:

a. Pemerintah sebagai *fasilitator* dalam pengelolaan wisata

fasilitator adalah pihak yang memberikan pelayanan berupa bantuan fisik, penyediaan jasa dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan wisatawan maka fasilitas pendukung sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan terhadap destinasi wisata tersebut.

b. Swasta sebagai penyelenggara dan penyedia jasa

Swasta yang bergabung dalam pengelolaan desa wisata biasanya menawarkan jasa yang dibutuhkan wisatawan selama berkunjung untuk menunjang pengembangan desa wisata tersebut, hal tersebut dapat berupa akomodasi yang memudahkan wisatawan. Selaras dengan itu dalam (Shintani, 2020:31) menjelaskan bahwa akomodasi wisata merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan wisatawan yang sedang melakukan kunjungan wisata, jenis akomodasi yang biasanya dibutuhkan wisatawan ialah penginapan atau *homestay* serta transportasi saat mereka sedang melakukan perjalanan wisata.

c. Masyarakat turut serta berperan dalam pengelolaan wisata

Dalam hal ini dijelaskan bahwa masyarakat turun serta dalam pengelolaan desa wisata yang dilakukan secara langsung baik itu dilakukan secara individual atau berkelompok. Bentuk partisipasi tersebut adalah masyarakat dengan sadar untuk ikut membantu program yang pemerintah berikan dan dengan inisiatif dan kreatifitas, mengambil bagian dalam pengembangan destinasi wisata atau berpartisipasi dalam upaya pembinaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan, dalam suatu pengelolaan desa wisata desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan melayani. Hal ini menunjukan suatu perbedaan antara desa wisata dengan wisata di desa, dalam pengelolaan desa wisata, desa perlu memastikan bahwa adanya suatu desa wisata ini benar-benar tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa selain itu dengan adanya kewenangan desa ini menjadikan nya bukan hanya suatu aktivitas wisata di desa melainkan sebagai suatu desa wisata dan menjadikan desa bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek dari aktivitas wisata ini.

3. *Collaborative Governance*

Kolaborasi merupakan proses interaksi yang mengikutsertakan beberapa *stakeholder* dalam menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian masalah dilakukan dengan menggabungkan beberapa pemikiran dari setiap *stakeholder* yang turut berpartisipasi dalam kolaborasi tersebut, dengan demikian ketergantungan antar aktor sangat dirasakan dalam proses kolaborasi ini, terdapat 3 (tiga) pokok utama pada kolaborasi, yaitu; pertama, setiap pihak memiliki tugasnya masing-masing, kedua terstruktur nya kelembagaan dari setiap pihak dan ketiga, diterapkan koordinasi dengan sistem (*operational interaction*). Bentuk suatu kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata dapat kita lihat pada model *collaborative governance*.

Ansell dan Gash (2007: 543) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan strategi baru yang membuat berbagai pemangku kebijakan berkumpul pada suatu forum untuk membuat kesepakatan bersama dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya Ansell dan Gash menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* melibatkan aktor non pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan bersama secara formal dan berorientasi pada konsensus dengan tujuan untuk membentuk atau menjalankan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Definisi dari Ansell dan Gash (2007: 5) menekankan enam (6) ciri. *Pertama*, forum tersebut dibentuk oleh institusi publik. *Kedua*, peserta

dalam forum tersebut harus meliputi aktor non pemerintah. *Ketiga*, peserta harus terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan dan tidak hanya sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. *Keempat*, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. *Kelima*, kebijakan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dan *keenam*, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2007: 544).

Collaborative governance merupakan model yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah sebab “kepemilikan bersama” masalah tersebut diciptakan melalui *collaborative governance*. Dalam melihat suatu permasalahan setiap aktor memiliki pandangan yang berbeda maka dengan itu untuk menciptakan se pemahaman di antara aktor tersebut bukanlah hal yang mudah. *Collaborative governance* dijadikan aransemen untuk menjadi penengah agar setiap aktor dapat memiliki pemahaman sama terhadap suatu masalah (Ansell dan Ansell, 2017: 172).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) dalam membentuk sebuah pencapaian dan konsensus yang sama melalui interaksi formal dan informal untuk pengembangan atau mengatasi suatu masalah yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Maka dengan itu interaksi *egaliter* atau kedudukan yang sama dari setiap aktor merupakan bentuk interaksi yang muncul pada *collaborative governance*.

Proses Collaborative Governance

Penelitian ini menggunakan model *process collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell and Gash (2007:558 -561) dalam mengetahui interaksi yang terjadi oleh setiap aktor dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari. Model ini digunakan karena dengan model ini banyak *collaborative governance* yang berhasil dilaksanakan. *Process collaborative governance* tersebut dibagi dalam 5 indikator sebagai berikut:

1. Face to Face Dialog

Dialog tatap muka merupakan sebuah proses terjadinya pertemuan dari berbagai pihak pada tempat dan waktu yang sama dan terjadi sebuah *dialog* secara langsung dan interaktif untuk membahas mengenai kepentingan dan tujuan bersama. Bagian ini menjadi proses yang penting karena menjadi awal untuk memulai suatu *collaborative governance* maka dengan itu jika tidak terjadi pertemuan tatap muka maka *collaborative governance* tidak akan terjadi. *Collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata dapat terjadi ketika Pokdarwis, pemerintah, dan pihak lain yang berhubungan bertemu.

2. Commitment to Process

Pada proses ini yang komitmen yang dilihat adalah komitmen atau kesepakatan bersama dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini berbagi komitmen membuat setiap pihak saling bergantung dalam menyelesaikan suatu

masalah dan menentukan solusi bersama. Dalam proses ini Pokdarwis, pemerintah dan pihak lainnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Trust Buliding

Membangun kepercayaan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki niat yang sama untuk mengikuti kebijakan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Membangun kepercayaan diawali dengan membentuk komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Dalam hal ini, peserta kolaborasi harus memiliki kepercayaan dan kredibel dalam kaitannya dengan kepentingan bersama. Mitra kolaborasi harus memahami bahwa terdapat saling ketergantungan antara pihak yang menciptakan kerjasama yang berkelanjutan

4. Shared Understanding

Shared Understanding adalah memiliki pemahaman yang sama atau berbagi pemahaman dan pengertian bahwa forum ini memiliki tanggung jawab bersama untuk mengidentifikasi masalah bersama, hal ini ditentukan dengan nilai inti yang menjadi dasar proses ini terjadi. Hal tersebut dapat digambarkan pada tugas bersama, tujuan bersama, objektivitas bersama, visi yang sama, kesamaan ideologi yang mendasari, dll. berbagi pemahaman dapat mempengaruhi konsensus dalam menafsirkan suatu masalah. Dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari setiap aktor diharapkan untuk berbagi pemahaman untuk

memecahkan masalah yang terjadi dan juga dalam hal ini diharapkan untuk memiliki visi dan misi yang sama.

5. Intermediate Outcomes

Intermediate Outcomes merupakan pencapaian sementara dari proses kolaborasi yang telah berlangsung dan dapat memberikan dampak langsung.

Dari penjelasan di atas mengenai *collaborative governance*, maka *collaborative governance* dalam penelitian ini dimaknai sebagai bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan dalam pengelolaan desa wisata. Dan terdapat lima proses dalam menuju suatu *collaborative governance* dan kelima proses tersebut memiliki keterkaitan yang tidak boleh terpisahkan. Jika terdapat proses yang tidak terlaksana maka dikatakan bahwa model *collaborative governance* Anshel dan Gash tidak berhasil diterapkan.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian merupakan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan hasil. Namun sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai ilmiah atau non ilmiah dengan melihat cara berpikir atau metode yang digunakan pada proses penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan tatacara yang dilakukan pada suatu penelitian untuk mengetahui dan menilai hasil penelitian yang dapat melahirkan pola pikir yang analitis, kreatif dan kritis.

1. Jenis Penelitian

Bagian ini berisikan penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi keadaan atau status fenomena yang berhubungan dengan *collaborative governance* desa wisata yang dikaitkan pada pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Selaras dengan itu Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode dengan melandaskan pada filsafat *postpositivisme* dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam metode ini sampel di ambil dengan menggunakan teknik *purposive* dan *Snowball*, analisis data yang dilakukan bersifat induktif/kualitatif dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Suharsimi Arikunto (2010:14), mengemukakan bahwa

penelitian eksploratif adalah penelitian yang berupaya mencari tahu mengenai sebab terjadinya sesuatu. Penelitian dengan metode eksploratif juga berupaya untuk menemukan pengetahuan baru dan mengetahui permasalahan yang sedang atau dapat terjadi. Peneliti berasumsi dengan menggunakan metode penelitian eksploratif ini peneliti ingin menggali secara luas bagaimana peran setiap aktor dan *process collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan waktu penelitian yang memakan waktu selama kurang lebih sebulan lamanya, yaitu pada bulan januari 2023 s/d februari 2023.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah kebijakan mengenai Desa Wisata Wukirsari, kolaborasi antara Pokdarwis dan pemerintah Kalurahan, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, wisata wayang Wukirsari, dan kampung batik Giriloyo yang ada di Kalurahan Wukirsari.

4. Subyek Penelitian

Pada dasarnya subyek penelitian merupakan sesuatu yang akan dikenai kesimpulan. Subyek penelitian merupakan seluruh obyek yang di

dalamnya juga terdapat narasumber yang memberikan informasi tentang permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian atau narasumber dapat juga disebut dengan istilah informan. Informan merupakan orang yang dapat menjadi sumber informasi akurat untuk melengkapi data penelitian. Terdapat tiga teknik untuk memperoleh informan penelitian yaitu: (1) *Procedure Purposive*, (2) *Procedure Kuota*, (3) *Procedure Snowball* (Burhan Bungin, 2017:73). Dalam menentukan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *procedure purposive* dengan memilih kriteria kelompok peserta yang dianggap relevan dalam memberikan informasi dan menjawab masalah dalam penelitian ini.

Analisis Data Informan

Dalam mendapatkan yang dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan pokok penelitian, maka berdasarkan data yang telah diperoleh saat melakukan penelitian dapat diketahui identitas informan yang meliputi kelompok umur, tingkat pendidikan, status sosial dan jenis kelamin.

Tabel 1.1. Deskripsi Informan Secara Umum

No	Nama	Status Sosial	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1.	Ferry	Jagabaya/Kasi Pemerintahan	34	Laki-Laki	S1
2.	Pardi	Anggota Paguyuban Wayang	42	Laki-laki	SMA

3.	Syarif	Anggota Pokdarwis dan Anggota BPD Wukirsari	28	Laki-laki	S2
4.	Jazir Hamid	Ketua Pokdarwis Wukirsari	36	Laki-laki	S1
5.	Hiptiah	Bidang Kerjasama dan Sosial Paguyuban Batik Giriloyo	34	Perempuan	SMA
6.	Nini	Anggota Paguyuban Batik Giriloyo	41	Perempuan	SMA
7.	Sekar	Anggota Paguyuban Batik Giriloyo	43	Perempuan	SMA
8.	Suyono	Ketua Paguyuban Wayang Wukirsari	45	Laki-Laki	SMA
9.	Suratin	Masyarakat	47	Perempuan	SMA
10.	Patrick	Pemuda	38	Laki-laki	SMA
11.	Rakhmad Pasa L., S.TP.	Carik	32	Laki-laki	S1

Sumber: Hasil wawancara informan, tahun 2023

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Morris (dalam Hasanah, 2017) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan mencatat segala sesuatu fenomena dengan bantuan alat-alat dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau yang lain, lebih jelasnya observasi adalah kumpulan tanggapan mengenai keadaan sekitar.

Pada penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengamati kondisi awal di lokasi penelitian. Data observasi awal itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun latar belakang penelitian serta rumusan masalah. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif dimana peneliti tidak lagi mengamati dari jauh melainkan bergabung langsung dengan obyek yang ingin diteliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Pada penelitian ini hal-hal yang di observasi adalah: kegiatan dalam Desa Wisata Wukirsari, pengelolaan Desa Wisata Wukirsari, kolaborasi antar aktor yang berperan dalam pengelolaan desa wisata, kehidupan masyarakat sebagai dampak dari hadirnya desa wisata, paguyuban kampung batik Giriloyo, wisata wayang Wukirsari dan Pokdarwis dan Swasta yang berperan di dalamnya. Peneliti mengharapkan dapat menemukan data yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi.

b. Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan responden atau antara pewawancara dengan (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) disebut dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan secara langsung.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan ber panduan pada panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Dalam melakukan wawancara orang yang diwawancarai disebut sebagai informan, dan informan dalam penelitian ini adalah: kepala Kalurahan Wukirsari, Ketua Pokdarwis, Pengurus Kampung batik Giriloyo, Pengurus Wakayng Wukirsari, Swasta yang berpartisipasi, dan beberapa masyarakat Wukirsari. Informan tersebut dianggap relevan karena diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai alat untuk menganalisa bagaimana *collaborative governance* yang terjadi pada pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka).

c. Dokumentasi

Sugiyono (dalam Nilamsari, 2014) untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian maka studi dokumentasi dilakukan untuk

melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam metode penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini menggunakan dokumen *resi* dan dokumen *eksternal*. Dokumen *eksternal* yang dimaksud merupakan informasi yang berasal dari suatu lembaga seperti majalah, koran, surat pernyataan, dan lain-lain. Pada penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan meminta kepada pihak Kalurahan Wukirsari berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut dapat berupa peraturan desa, profil Kalurahan wukirsari, profil Paguyuban Giriloyo, buku, jurnal dan laporan yang dianggap relevan dengan topik penelitian untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan teori yang digunakan dengan kenyataan penelitian serta membantu peneliti mengelola dan menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini:



(sumber: Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016))

Gambar 1. Alur Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah tahapan pemilihan data yang diperoleh per rangkuman data dilakukan untuk memudahkan peneliti

dalam memilah data. Pada tahapan ini dilakukan dengan membuat deskripsi atau ringkasan, memisahkan antara data yang diperlukan dan tidak dengan menggunakan pola tertentu. Kemudian, data yang ada harus ditranskrip untuk mendeskripsikan data secara keseluruhan. Jika terdapat kekurangan data, maka peneliti harus menguatkan data tersebut dengan menambahkan data tambahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data kegiatan menyajikan data atau hasil informasi yang disusun dalam bentuk naratif, bagan, dan hubungan antar kategori dan pada akhirnya digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan. Jika dalam proses pengujian data yang ada mengalami perkembangan dan yang telah dirumuskan didukung oleh data, maka pada akhirnya menjadi pola yang konsisten dan disajikan sesuai dengan yang telah diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika tidak dapat menjawab rumusan masalah di awal, karena rumusan masalah pada dasarnya bersifat sementara dan berkembang seiring dengan berjalannya penelitian. Pengambilan kesimpulan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan cara membandingkan pernyataan dengan kondisi di lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang tepat dalam menghasilkan sebuah kesimpulan.

BAB II

DESKRIPSI UMUM KALURAHAN WUKIRSARI

A. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari

Kalurahan Wukirsari menurut masyarakat terdahulu berasal dari kata “Wukir” yang artinya adalah gunung dan “Sari” yang artinya bagus, jadi Wukirsari berarti suatu wilayah pegunungan yang bagus. Kalurahan Wukirsari pada awalnya adalah gabungan dari empat kalurahan, yaitu Kalurahan Giriloyo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Pajimantan dan Kalurahan Singosaren. Kemudian pada tahun 1946, keempat kalurahan tersebut bergabung menjadi satu kalurahan yang kemudian disebut Kalurahan Wukirsari. Kalurahan Wukirsari hanyalah sebuah kalurahan yang sama seperti kalurahan lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik tersendiri. Masyarakat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan bercocok tanam dan menekuni pembuatan kerajinan yang telah diwariskan sejak turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yaitu batik tulis dan wayang. Namun pertanian saat mulai menurun dan menjadi usaha sampingan bagi masyarakat sekitar karena kualitas tanah yang kurang baik, 2/3 tanah yang ada merupakan lereng bukit yang tandus dan 1/3 sisanya digunakan untuk peternakan.

setelah gempa bumi yang menimpa Daerah Istimewa Yogyakarta dan menghancurkan beberapa bangunan asli setempat, diketahui bahwa semangat warga Kalurahan Wukirsari tetap terjaga, kesadaran akan potensi wisata Kalurahan Wukirsari dimulai pada saat adanya Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) pasca gempa tahun 2008. Dengan mendirikan kelompok batik, yang diawali dengan empat kelompok batik yang kemudian menarik perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena melihat potensi Kalurahan Wukirsari sehingga LSM IRE (*Institute for Research and Empowerment*) yang bekerja sama dengan JHS (Jogja Heritage Society) dan Australia-Indonesia *Partnership* membantu untuk pelatihan pewarnaan, desain dan pemasaran batik. Kemudian dengan berjalananya waktu, wilayah Kalurahan Wukirsari mendukung adanya paguyuban batik dan hingga sekarang kelompok batik pun bertambah menjadi 12 kelompok. Kemudian di bangunlah gazebo wisata atas bantuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan LSM yang bekerjasama berupa gazebo dalam ukuran kecil untuk pelatihan membatik dan showroom dari 12 kelompok batik yang dikumpulkan, kemudian gazebo tersebut sekarang menjadi sentra wisata batik (Kampung Batik Giriloyo).

Adapun saat ini Kalurahan Wukirsari terbagi menjadi 16 wilayah padukuhan yaitu :

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Padukuhan di Kalurahan Wukirsari

NO	Nama Padukuhan	Jumlah RT
1.	Bendo	7
2.	Cengkeh	4
3.	Dengkeng	4
4.	Giriloyo	6
5.	Jatirejo	8

6.	Karangasem	6
7.	Karangkulon	9
8.	Karangtulan	6
9.	Kedung Buweng	4
10.	Manggung	7
11.	Nogosari I	7
12.	Nogosari II	11
13.	Pundung	4
14.	Sindet	5
15.	Singosaren	5
16.	Tilaman	4
Total		97

Sumber: Website Kalurahan Wukirsari pada Februari 2023

Wilayah Kalurahan Wukirsari berjarak 16 Km di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan kantor/balai desa yang berada di Dusun Nogosari I. Luas wilayah Kalurahan Wukirsari berkisar kurang lebih 15.385,504 Ha yang terdiri dari 97 RT dan 16 Pedukuhan.

Adapun batas wilayah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut :

- Utara : Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Trimulyo
- Timur : Kalurahan Muntuk
- Selatan: Kalurahan Girirejo
- Barat : Kalurahan Trimulyo

Gambar 2.1. Peta Perbatasan Kalurahan Wukirsari



Sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi merupakan potensi yang cukup besar yang dimiliki oleh Kalurahan Wukirsari. Namun hingga saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan sehingga peluang untuk potensi tersebut dijadikan akselerasi pembangunan masih terbuka lebar.

Dalam melakukan sebuah pembangunan keadaan demografi wilayah tersebut menjadi salah satu faktor utama, karena pembangunan merupakan setiap perubahan yang terjadi pada manusia ke arah yang lebih baik. Maka dengan itu dalam pembangunan objek dan subjeknya adalah manusia maksudnya ialah yang menjadi sasaran pembangunan dan sebagai pelaku pembangunan itu adalah manusia itu sendiri. Berdasarkan hal itu maka peneliti merincikan jumlah penduduk di Kalurahan Wukirsari dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-14 Tahun (Belum Produktif)	2.073	1.954	4.027
2.	15-64 Tahun (Produktif)	6.138	6.060	12.198
3.	>64 Tahun	736	976	1.712
JUMLAH		8.947	8.990	17.937

Sumber: Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021, diakses melalui website <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/pada Februari 2023>

Pada tabel 2.2. di atas mengidentifikasi sebaran data penduduk di Kalurahan Wukirsari berdasarkan usia. pada tabel yang tertera di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kalurahan Wukirsari sebagian besarnya berada pada rentang usia 15-64 Tahun (produktif) yakni sebanyak 12.198 jiwa. Dengan demikian disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengelola dan menjalankan Desa Wisata Wukirsari merupakan golongan usia produktif.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Islam	8.879	8.829	17.808
2.	Kristen	32	27	59
3.	Katholik	36	34	70
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
6.	Konghuchu	-	-	-
7.	Aliran Kepercayaan	-	-	-
JUMLAH		8.947	8.990	17.937

Sumber: Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021, diakses melalui website <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/pada Februari 2023>

Berdasarkan tabel 2.3. yang berisikan data mengenai sebaran jumlah masyarakat Kalurahan Wukirsari berdasarkan agama yang dianut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Kalurahan Wukirsari adalah beragama Islam, hal itu dikarenakan sebanyak 17.808 jiwa yang beragama Islam. Sementara itu untuk agama yang penganutnya terbanyak kedua adalah Katholik dengan jumlah sebanyak 70 jiwa kemudian dilanjutkan Kristen dengan jumlah sebanyak 59 Jiwa. Di Kalurahan Wukirsari hanya terdapat tiga agama yang di anut oleh masyarakatnya yaitu, Islam, Kristen, dan Katholik. Sementara itu untuk agama Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain-lainnya tidak ada.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Bekerja	362	630	992
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	347	347
3.	Pelajar/Mahasiswa	860	865	1.725
4.	Pensiunan	86	36	122
5.	Pegawai Negri Sipil	129	115	244
6.	TNI	18	0	18
7.	Kepolisian RI	38	1	39
8.	Pejabat Negara	3	0	3
9.	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	1.863	1.536	3.399

Sektor				
10. Pertanian/Peternakan/Perikanan	459	528	987	
11. Karyawan BUMN/BUMD	12	1	13	
12. Karyawan Swasta	582	606	1.118	
13. Wiraswasta	2.361	1.788	4.149	
14. Tenaga Medis	7	28	35	
15. Pekerjaan Lainnya	94	218	312	
JUMLAH	6.874	7.036	13.910	

Sumber: Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021, diakses melalui website <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/> pada Februari 2023

Melihat pada Tabel 2.4. yang memuat mengenai sebaran data jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Wukirsari berstatus sebagai Wiraswasta yakni sebanyak 4.149 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk terbanyak kedua berstatus sebagai buruh/tukang dengan keahlian khusus sebanyak 3.776 jiwa, berdasarkan hasil observasi kebanyakan dari masyarakat yang berstatus pekerjaan wiraswasta merupakan pembatik atau penatah wayang yang membuka *showroom* sendiri di rumahnya. Jumlah terbanyak ketiga adalah berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dengan jumlah sebanyak 1.725 jiwa.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Sekolah	1.988	2.203	4.191
2.	Belum Tamat SD	554	441	995
3.	Tamat SD	2.397	2.397	4.794
4.	Tamat SMP	1.598	1.543	3.141
5.	Tamat SMA	1.937	1.780	3.717
6.	Diploma I/II	35	61	96
7.	Diploma III	100	173	273
8.	Diploma IV/Strata I	311	370	681
9.	Strata II	24	22	46
10.	Strata III	3	0	3
JUMLAH		8.847	8.990	17.937

Sumber: Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021, diakses melalui website <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/> pada Februari 2023

Berdasarkan tabel 2.5. yang berisikan data mengenai sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Wukirsari memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SD dengan jumlah sebanyak 4.794 jiwa hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang entah hal itu disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan ataupun masyarakat yang telah lulus ingin langsung mencari pekerjaan. Sementara itu jumlah terbanyak kedua dengan status belum/tidak bersekolah yaitu sebanyak 4.191 Jiwa.

B. Deskripsi Desa Wisata Wukirsari

Desa Wisata Wukirsari merupakan salah satu dari kawasan wisata yang di Kabupaten Bantul yang difokuskan pada pengembangan edu-wisata dan eco-wisata. Kalurahan Wukirsari telah dikukuhkan secara resmi menjadi desa wisata melalui Surat Keputusan Pemerintah Desa dan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul yang pengelolaan dilakukan secara pemberdayaan masyarakat dengan seluruh unsur kemasyarakatan dilibatkan dan di koordinasi oleh pengelola Desa Wisata Wukirsari

Desa Wisata Wukirsari merupakan desa wisata yang terletak di Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Desa Wisata Wukirsari adalah salah satu desa yang menjadi desa rintisan batik tulis. Pada destinasi batik ini wisatawan dapat belajar dan melihat langsung proses pembuatan batik. Sentra batik disini pun juga sering dijadikan rujukan berbagai sekolah dan perguruan tinggi untuk belajar mengenai batik. Selain itu, wisatawan dapat mendapatkan batik tulis dengan harga yang relatif lebih murah. Selain kerajinan batik, Desa Wisata Wukirsari juga memiliki kerajinan kulit atau tatah sungging yang merupakan kerajinan turun menurun dengan produk yang dihasilkan berupa wayang dan hiasan kulit lainnya. Selain kerajinan penduduk asli yang menjadi daya tarik utama, geografi Desa Wukirsari yang beragam, mulai dari perbukitan, sungai, hutan, dan lahan-lahan pertanian membuat desa ini tampak sangat asri. Tidak lupa juga makam-makam yang berada di wilayah Desa wukirsari yang sering menjadi tempat ziarah.

C. Destinasi/Potensi Desa Wisata Wukirsari

1. Kampung Batik Giriloyo

Merupakan destinasi unggulan yang ada di Desa Wisata Wukirsari yang menjadikan belajar membatik sebagai salah satu atraksi unggulannya. Destinasi wisata ini dipusatkan di Dusun Giriloyo, Karangkulon dan Cengkeh. Strategi belajar membatik menjadi salah satu cara yang digunakan oleh warga Wukirsari untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1634 silam. Tidak hanya menjadi ajang wisata, kegiatan pada destinasi wisata batik ini melibatkan lebih dari 600 pengrajin batik yang berperan sebagai pemandu wisata belajar batik, sehingga setiap hal yang terjadi pada destinasi ini akan berdampak pada taraf hidup masyarakat yang berprofesi sebagai pembatik di Kalurahan Wukirsari.

Wisatawan yang datang berkunjung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan jumlah wisatawan mencapai 25.000 orang per tahun 2018 menunjukan bahwa wisata memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan ekonomi Desa Wukirsari dalam pemberdayaan wanita dan masyarakat.

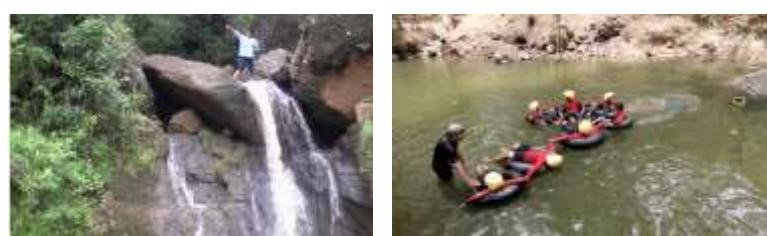


Gambar 2.2. Kampung Batik Giriloyo

2. Air Terjun Sewu Watu

Merupakan bentuk pelestarian air pegunungan melalui pengelolaan wisata berbasis lingkungan. Air terjun Sewu Watu ini menjadi bagian dari daya tarik alami Wukirsari yang terletak di kawasan perbukitan Cengkehian yang merupakan bagian dari perbukitan Pasak Seribu dengan memiliki mata air yang melimpah dan membentuk anak-anak sungai di sepanjang perbukitan. Sumber air ini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat Giriloyo, sehingga mereka memiliki komitmen untuk terus menjaga keberlangsungan aliran sungai tersebut. tetapi sebagai bagian dari pengembangan wisata, maka perlindungan alam ini dikemas dalam sebuah wisata berbasis Eco-wisata dalam atraksi *outbound* susur sungai di Air Terjun Sewu Watu.

Atraksi wisata ini berfokus dikelola oleh Karang Taruna yang memberdayakan para remaja untuk terlibat dalam pengelolaan wisatanya. Bukan hanya remaja yang menjadi wisatawan dalam atraksi ini, tetapi juga kelompok keluarga. Sebab, *outbound* menjadi ajang untuk meningkatkan kerekatan hubungan personal. Wisata ini juga mengenalkan kepada wisatawan untuk perduli mengenai konservasi alam dan perairan pegunungan.



Gambar 2.3. Air Terjun Watu Sewu

3. Situs Religi

Hubungan Desa Wukirsari dengan Keraton Yogyakarta merupakan hubungan yang sangat erat yang telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Dimulainya pembangunan kawasan pemakaman keluarga Keraton Yogyakarta menjadikan Wukirsari sebagai salah satu desa yang sarat akan sejarah masa lalu, terutama berkaitan erat dengan penyebar luasan kawasan Keraton Yogyakarta di sekitar Imogiri. Adanya situs menjadikan daya tarik wisatawan yang ingin mengunjungi dan berziarah di peristirahatan terakhir para Raja Mataram. Sehingga arus wisatawan yang awalnya berkunjung ke Keraton, akan meluaskan tujuan wisatanya hingga ke Wukirsari. Kawasan Religi ini dikelola bekerja sama dengan para abdi dalem yang bertugas menjadi penjaga dan pemelihara Makam Raja-Raja di Pajimatan. Selain itu, situs religi lain yang berkaitan erat dengan sejarah adalah Situs Makam Sunan Giriloyo dan Panembahan Juminah. Keduanya, bersama dengan kawasan Makam Raja di Pajimatan laris dikunjungi peziarah.



Gambar 2.4. Situs Makam Raja-raja Mataram

4. Karya Seni Warisan Leluhur

Melalui peran Pokdarwis dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, maka Wukirsari telah menerapkan kolaborasi erat yang terjalin dalam tatanan masyarakat yang memiliki komitmen untuk mengembangkan setiap produk

kerajinan tangan yang ada sebagai bagian dari roda penggerak ekonomi desa. Gotong-royong yang selalu menjadi poros utama dalam mengembangkan seluruh potensi ekonomi di Wukirsari. Terdapat beberapa kerajinan tangan yang dibuat untuk menjadi buah tangan ataupun *souvenir* dan di jual oleh masyarakat, kerajinan tersebut antara lain kerajinan bambu, wayang (tatah sungging), rajut, dan kerajinan dari bahan batik.



Gambar 2.5. Bentuk Kerajinan yang ada di Wukirsari

5. Wisata Kuliner

Desa Wukirsari menyadari sepenuhnya, bahwa potensi wisata harus terus dikembangkan. Terobosan ide terbaru di tahun 2018 menghadirkan sebuah kawasan wisata kuliner yang dikemas secara apik dan tradisional di bawah rimbunan kawasan hutan jati di pinggir sungai. Wukirsari menyajikan serangkaian jajanan tradisional yang enak dinikmati di pagi hari. Kawasan ini secara serius dan professional dikembangkan oleh rekan-rekan karang taruna yang bersinergi erat dengan para ibu rumah tangga untuk menyajikan lebih dari 50 jenis kios makanan jaman dahulu. Pokdarwis menyadari, bahwa inovasi yang dilakukan haruslah dibarengi dengan komitmen masyarakat. Sehingga, keberadaan Pasar Sor Jati meningkatkan interaksi masyarakat dengan menggunakan alat tukar koin bambu sebagai alat jual beli, menjadikan kawasan kuliner ini beda dengan yang lain, dan tentunya, sangat mengesankan.

Komitmen tanpa kantong plastik disadari sebagai gerakan masyarakat melindungi bumi dari pencemaran kemasan tak ramah lingkungan.



Gambar 2.6. Pasar Sor Jati di Desa Wisata Wukirsari

Terdapat berbagai macam destinasi wisata yang termuat dalam Desa Wisata Wukirsari seperti yang sudah digambarkan pada penjelasan di atas, tetapi pada penelitian ini tidak semua destinasi wisata masuk ke dalam aspek yang dikaji dalam penelitian ini. Hanya dua destinasi wisata saja yang masuk dalam kajian ini yaitu destinasi wisata Kampung Batik ‘Giriloyo’ dan Wayang ‘Wukirsari’. Spesifikasi terhadap kedua destinasi ini dipilih karena cikal bakal munculnya proses *collaborative governance* di Kalurahan Wukirsari diawali dari pemberdayaan kelompok pengrajin batik dan wayang kulit dan juga kedua destinasi ini merupakan destinasi yang saat ini sudah mulai berkembang pasca terjadinya pandemi covid-19 . Munculnya kelompok pengrajin batik dan wayang kulit setidaknya berperan vital dalam menjadikan kalurahan Wukirsari sebagai desa wisata. Sedangkan untuk beberapa destinasi lainnya seperti wisata alam air terjun dan wisata kuliner tidak dipilih karena pasca terjadinya pandemi covid-19 destinasi tersebut belum dimulai kembali aktivitasnya dan untuk wisata situs religi yaitu makam raja-raja tidak dipilih karena lokasi tempat destinasi tersebut masuk ke dalam dua wilayah kalurahan yang berbeda

sehingga pengelolaan destinasi tersebut tidak menjadi hal diprioritaskan oleh pengelola Desa Wisata Wukirsari.

D. Fasilitas/Sarana dan Prasarana Desa Wisata Wukirsari

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan hal yang cukup penting dalam menunjang perkembangan dan pengelolaan Desa Wisata Wukirsari. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka akan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Wukirsari dan juga kenyamanan bagi masyarakat dan pengelola Desa Wisata Wukirsari. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pengelolaan Desa Wisata Wukirsari:

1. *Homestay* Adiluhung

Salah satu yang menjadi kebutuhan penting adalah *homestay* bagi para wisatawan yang berkunjung untuk merasakan sensasi pengalaman hidup dan berinteraksi dengan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Wukirsari mengajak masyarakat untuk menggunakan sebagian rumahnya sebagai *homestay*. Saat ini terdapat lebih dari 40 rumah yang telah berkomitmen untuk menggunakan tempat tinggalnya sebagai *homestay* dengan kapasitas tinggal wisatawan mencapai 120 orang. Kerja keras masyarakat ini juga membawa prestasi bagi Desa Wisata Wukirsari dimana pada tahun 2016, salah satu *homestay* di Wukirsari mendapatkan penghargaan tingkat ASEAN sebagai *homestay* bertaraf internasional. Dukungan pun kemudian dilakukan oleh

berbagai lembaga, termasuk salah satunya Dinas Pariwisata DIY yang mendukung pembangunan toilet bertaraf internasional di *homestay* yang ada.



Gambar 2.7. Homestay yang ada di Desa Wisata Wukirsari

2. Akses Jalan dan Taman Parkir

Akses jalan yang mulus yang menghubungkan seluruh kawasan Desa Wukirsari menjadikan para wisatawan sangat mudah untuk menjelajahi seluruh kawasan wisata. Akses ini juga didukung dengan jangkauan listrik yang secara 100% telah menjadi bagian hidup masyarakat di Desa Wukirsari. Kendaraan besar seperti bus juga dapat mengakses kawasan wisata ini dengan mudah dan telah tersedia kawasan taman parkir luas yang mampu mengakomodasi 20 bus besar. Sehingga memudahkan rombongan wisata mengunjungi kawasan wisata Wukirsari.



Gambar 2.8. Fasilitas jalan dan taman parkir di Desa Wisata Wukirsari

3. Jaringan data

Meskipun berada di ujung Kota Yogyakarta, tetapi kawasan Desa Wisata Wukirsari tetap berorientasi pada adanya konektivitas dengan dunia internasional melalui penyediaan jaringan internet yang didukung oleh

pemerintah desa. Sehingga, wisatawan yang berkunjung tetap dapat mendapatkan akses data dalam setiap kegiatannya selama berada di kawasan Desa Wisata Wukirsari. Hal ini juga mendukung promosi dan pengenalan desa kepada seluruh pihak yang terhubung melalui internet. Oleh karena itu, akses yang tak terbatas pada informasi yang disediakan di kawasan ini menjadikan Wukirsari semakin mendunia.

4. Tempat Ibadah

Tidak perlu khawatir jika menginginkan beribadah dengan khusyuk di Wukirsari, sebab Desa Wisata Wukirsari menyadari bahwa ketersediaan fasilitas peribadatan menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah kawasan wisata. Melalui kerja sama dengan keluarga pondok pesantren, maka Desa Wisata Wukirsari memiliki akses area beribadah yang mudah dijangkau oleh seluruh kalangan.



Gambar 2.9. Tempat Beribadah di Desa Wisata Wukirsari

E. Tujuan Desa Wisata Wukirsari

Dengan hadirnya Desa Wisata Wukirsari diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan meningkatnya sumber daya manusia, menggali dan mengembangkan potensi serta daya tarik wisata yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu pemerintah dalam

mewujudkan sapta pesona (keamanan, ketertiban, kesejukan, keindahan, kebersihan, keramahtamahan dan ketenangan.)

F. Pengelola Desa Wisata Wukirsari

1. Paguyuban

Salah satu yang menjadi pengelola di Desa Wisata Wukirsari adalah paguyuban yang menjadi pengurus di beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Wukirsari. Paguyuban ini sendiri memiliki peranan yang cukup penting pada pengelolaan destinasi yang ada, karena paguyuban inilah yang mengatur dan mengurus pengelolaan pada destinasi tersebut. contohnya seperti yang terjadi pada destinasi wisata Kampung Batik Giriloyo dan Wayang Wukirsari, pada kedua destinasi tersebut paguyuban lah yang berperan penting dalam pengelolaannya, pengurus paguyuban lah yang menjadi aktor yang berinovasi untuk pengembangan destinasi yang dikelola.

Paguyuban ini juga menjadi awal dari terbentuknya Desa Wisata Wukirsari. Pengelolaan batik yang menjadi sentra dari destinasi wisata di Wukirsari awalnya dikelola oleh kelompok-kelompok penulis batik yang kemudian berkembang menjadi paguyuban dan terus membuat inovasi-inovasi sehingga kerajinan batik di Wukirsari dapat terus berkembang dan semakin di kenal di dunia luar.

2. Pokdarwis Wukirsari

Pariwisata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi di Kalurahan Wukirsari, sehingga pariwisata di Kalurahan Wukirsari mendapat perhatian lebih agar memberikan perkembangan yang

baik. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong sektor pariwisata agar pengembangan pariwisata berjalan dengan baik. Salah satu yang menjadi pendukung pengembangan pariwisata di desa adalah gerakan sadar wisata. Gerakan sadar wisata tersebut diwujudkan melalui adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi aktor penggerak kepariwisataan Kalurahan Wukirsari.

Keberadaan Pokdarwis sebagai suatu institusi lokal terdiri atas para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan Desa Wisata Wukirsari. Pokdarwis menjadi kelompok yang bergerak secara swadaya dan melakukan pengembangan pariwisata berdasarkan potensi lokal dan kreativitas yang dimiliki oleh Kalurahan Wukirsari. Pokdarwis Wukirsari didirikan pada awal tahun 2009, yang pada masa itu terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dari kementerian pariwisata. Berkat kerja keras dan gotong-royong masyarakat akhirnya pada tahun 2012 pemerintah Kalurahan Wukirsari membentuk dan memproklamirkan menjadi suatu kawasan desa wisata yang diberi nama Desa Wisata Wukirsari dan Kelompok Sadar Wisata Wukirsari yang telah mendapat pengukuhan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 345/KEP/2022 Tentang Penetapan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.



Gambar 2.10. Penetapan Pokdarwis melalui Keputusan Gubernur DIY

Pada awal sebelum terbentuknya Desa Wisata Wukirsari, kepengurusan di pegang oleh masing-masing paguyuban yang ada yaitu batik dan wayang, kemudian setelah dibentuknya Desa Wisata Wukirsari pengelolaan itu diserahkan kepada Pokdarwis dalam kepengurusan Desa Wisata Wukirsari. Hal ini disampaikan oleh ketua Pokdarwis pada saat wawancara, berikut petikan wawancaranya:

“...Kalau dulu sebelumnya kan awalnya itu Desa Wisata Wukirsari itu tidak ada niatan untuk membentuk desa wisata, itu ada karena ada dana dari program PNPM Mandiri waktu itu sekitar tahun 2010 atau 2009 dan pada saat program itu Pokdarwis belum terbentuk, karena sebelum adanya desa wisata kami sudah punya paguyuban masing-masing dan itu sudah cukup terkenal hingga kemudian brand batik ini mulai terkenal dan dibentuk desa wisata dengan branding diangkat melalui batik ini. Kemudian Pokdarwis ini terbentuk dan kepengurusan desa wisata ini melalui Pokdarwis...” (Wawancara dengan Pak Jazir Hamid, 14 Februari 2023)

Pada Saat ini kepengurusan Desa Wisata Wukirsari melalui Pokdarwis adalah sebagai berikut:

Pembina : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Bupati Bantul

Dinas Pariwisata Provinsi DIY

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Penasihat	: Lurah Wukirsari
	Bamuskal (Badan Musyawarah Kalurahan)
	Tokoh Masyarakat
Ketua	: Jazir Hamid
Sekretaris	: Mahendra Putra Pratama
	Nur Tria Wijayanti
Bendahara	: Vicky Ian Syahroni
	Rusni W.

-Seksi Ketertiban & Keamanan

1. Agus Wantoro
2. Junaidi
3. Riswanto
4. Gufron Fahruzi
5. Mustofa

- Seksi Kebersihan & Keindahan

1. Ahmad Sunhaji
2. Okto Yusuf Prihantoro
3. Slamet Lestari
4. Iwan R.

- Seksi Hubungan Masyarakat & SDM

1. Wakhid
2. Tujiyanto

3. Ponijan
4. Jamharyanto

-Seksi Daya Tarik & Kenangan

1. Rahmad Hidayat
2. Yuni L
3. Mi. Fahmi
4. M. Arif Repawan

- Seksi Pengembangan Usaha

1. Syarif Hidayat
2. Washihatun

Untuk membangun kepariwisataan salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan dengan perwujudan sadar wisata dan sapta pesona yang dikembangkan secara konsisten oleh masyarakat melalui Pokdarwis Wukirsari. Dalam mendukung hal tersebut Pokdarwis Wukirsari menyatakannya dalam program kerja yang telah disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Program Kerja Pokdarwis Wukirsari

Program Kerja	Keterangan Kerja
Program Kerja Jangka Pendek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan AD/ARTt Pokdarwis dan penyusunan profil pokdarwi serta logo Pokdarwis 2. Sosialisasi tentang manfaat SADAR WISATA dan SAPTA PESONA kepada masyarakat pengelola desa wisata secara berkala 3. Giat sapta pesona Pokdarwis 4. rapat kerja bulanan Pokdarwis 5. Musyawarah penyusunan dan penetapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 6. Musyawarah RKP (Rencana Kegiatan Program) tahun 2022 7. Pengamalan sapta pesona diprioritaskan kepada para pelaku pariwisata di desa wisata dan obyek wisata, demi terciptanya pelayanan prima bagi wisatawan yang berkunjung 8. Pembuatan papan sapta pesona dan papan himbauan serta papan informasi agar memudahkan wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata di wilayah desa wisata 9. Pembuatan sarana dan prasarana penunjuk arah desa wisata 10. Peningkatan kapasitas Pokdarwis (kunjungan kerja) 11. Pembuatan promosi bersama melalui pembuatan baliho tempat wisata bersama
Program Kerja Jangka Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sumberdaya manusia, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan keterampilan di bidang: kuliner, pengelolaan sampah, dan kerajinan 2. Melakukan inovasi pelayanan wisata secara prima berdasarkan sapta pesona 3. Pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata 4. Menghidupkan home stay dan kegiatan budaya jawa atau adat tradisi jawa di Wilayah Wukirsari 5. Membuat promosi pariwisata secara virtual dalam <i>media social</i> (Facebook, Instagram, Youtube, dan Website desa)
Program Kerja Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajak masyarakat untuk melakukan revitalisasi penghijauan secara berkala demi terciptanya pariwisata yang berkelanjutan (<i>sustainable</i>)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pencapaian kunjungan wisatawan tidak sebatas berapa banyak melainkan dengan target kunjungan ulang dan lama tinggal wisatawan 3. Pelestarian budaya (<i>culture</i>) sebagai salah satu daya tarik wisata edukasi yang mencerminkan kelokalan ALUI: (<i>Asli, Lokal, dan Unik</i>) dengan tujuan mengantisipasi kejemuhan wisatawan terhadap wisata konvensional. 4. Terciptanya lapangan pekerjaan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
--	--

Sumber: Profil Pokdarwis Wukirsari Tahun 2022

G. Kolaborasi dan Sinergi

Desa Wisata Wukirsari percaya bahwa melalui kolaborasi pengembangan pariwisata akan semakin pesat dan maju. Sehingga, sejak tahun 2006, Desa Wisata Wukirsari berusaha untuk berkolaborasi bersama berbagai kalangan, baik itu LSM, Pemerintah, Swasta, maupun perguruan tinggi. Berikut daftar kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa Wisata Wukirsari:

1. PNPM Mandiri Pariwisata 2009
2. Program dari JHS dan IRE 2008
3. Program dari USAID 2008
4. CSR Pertamina untuk pembangunan toilet standard internasional dan pengembangan area belajar membatik, museum, dan pelatihan tahun 2017
5. Pembangunan Showroom batik oleh Disperindag Jogja 2016
6. Pembangunan pagar dinas pariwisata 2017
7. Pembangunan infrastruktur wayang oleh Bank Central Asia 2016
8. Pembangunan taman parkir dinas pariwisata DIY 2018
9. LSM Dompet Duafa 2007

10. PT Primissima 2014
11. Pendampingan penguatan organisasi UPN Yogyakarta 2015
12. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Teknologi Mercu Buana 2017
13. Perencanaan kawasan wisata UGM 2017

H. Prestasi Desa Wisata Wukirsari

Selama Desa Wisata Wukirsari terbentuk berbagai ajang kompetisi telah diikuti oleh kawasan Desa Wisata Wukirsari sebagai ajang untuk mengenalkan keunggulan dalam dunia pariwisata. Desa Wisata Wukirsari percaya bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, sehingga mereka percaya bahwa setiap terobosan dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemajuan desa menjadi sesuatu yang layak di apresiasi. Berikut beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Desa Wisata Wukirsari:

1. Pemecahan Rekor Muri Selendang Batik Terpanjang 2007
2. Juara III Desa Wisata DIY 2014
3. Juara I Desa Wisata Mandiri Bantul 2014
4. Juara III Pokdarwis Bantul 2014
5. Juara I Festival Kuliner Kampung Wisata DIY 2015
6. Juara II Pokdarwis Bantul 2016
7. Juara I Pokdarwis DIY 2015
8. Peringkat V Pokdarwis Nasional 2017
9. Peringkat VI Pokdarwis Nasional 2016
10. ASEAN Award untuk *Homestay Adiluhung* 2016

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan ruang lingkup penelitian terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari setiap aktor memainkan peran yang berbeda-beda. Pemerintah Kalurahan Wukirsari dan pihak swasta yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari berperan sebagai fasilitator dalam menunjang pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari.

1. Pemerintah Kalurahan Wukirsari berperan dengan menyediakan lokasi untuk destinasi wisata dari tanah kas desa. Pemerintah kalurahan juga melakukan perannya sebagai fasilitator dengan membuat regulasi mengenai pemanfaatan tanah kas desa tersebut serta menjadi jembatan yang menghubungkan antara destinasi wisata (paguyuban) dengan luar desa. Kemudian pemerintah kalurahan juga mendukung dengan memberikan anggaran untuk pengembangan Desa Wisata Wukirsari yang dituangkan dalam APBKal tahun 2023. Pihak swasta berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari melakukan perannya dengan memberikan bantuan berupa pembangunan fisik dan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk pengembangan Kalurahan Wisata Wukirsari. Masyarakat Wukirsari dalam pengelolaan Kalurahan wisata Wukirsari sendiri berperan sebagai

pelaku utama dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari. Dalam pengelolaannya, masyarakat yang berperan sebagai pelaku wisata yang bergerak melalui paguyuban untuk mengelola destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Wukirsari. Selain sebagai pelaku wisata yang bergerak melalui paguyuban masyarakat juga yang berperan sebagai Pokdarwis yang mengatur dan mengelola Desa Wisata Wukirsari. Dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki peran yang dominan dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari.

2. *Process collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat indikator dalam *process collaborative governance* yang tidak tercapai yaitu *commitment to the process* dan *shared understanding*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu:

1. Untuk meningkatkan se pemahaman visi dan tujuan (*shared understanding*)

Pemerintah Kalurahan Wukirsari dapat lebih pro aktif lagi dalam upaya pengembangan Desa Wisata Wukirsari. Pemerintah Wukirsari dapat membuat sebuah skema paket wisata untuk beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Wukirsari untuk mengembangkan kolaborasi antar aktor di setiap destinasi dan juga mengembangkan destinasi wisata itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan skema paket wisata ini seluruh destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Wukirsari dapat berkembang dengan baik tidak hanya beberapa destinasi saja.

2. Untuk meningkatkan kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari diperlukan *commitment to the process* yang baik dalam melakukan kolaborasi tersebut, untuk itu pemerintah Kalurahan Wukirsari dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang menjalin kolaborasi dengan Desa Wisata Wukirsari benar-benar berkomitmen terhadap kolaborasi tersebut dengan membuat kontrak perjanjian yang memuat kesepakatan bersama dalam kolaborasi dan sanksi jika kontrak tersebut dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. J. (2021). *Collaborative Governance Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal*. *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2). <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak. ISBN: 978-602-474-392-5
- Ansell, Chriss dan Alison Gash. (2007). *Collaborative Govetnance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Administration Research and Theory*.
- Ardhia. M & Kristina, S. (2020). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Borobudur Melalui Program Balai Ekonomi Dese (Balkondes)*. Skripsi. FISIP. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chris Ansell and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkley: University of Chariantoomia.
- Daerah Istimewa Yogyakarta. 2022. *Keputusan Gubernur Nomor 345 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tahun anggaran 2022
- Djulianto. (2022). *Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’, Yogyakarta.
- Gerring, J., & Thcaker, S. C. (2008) . *A Centripental Theory Of Democratic Givernance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511756054>
- Hariadi, Andi. (2019). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. FISIP. Universitas Muhammadiyah ,Makassar.
- Hasanah Mauizatul. 2017. Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan) Skripsi. Univeristas Hasanuddin, Makassar
- Kennett, P. (2008). *Governance, globalization and public policy*. In P. Kennett (Ed.), *Governance, Globalization and Public Policy*. Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781848440135>

- Kirana dara & Anggun Artistan. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.1
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.*
- Nofirma, Dkk. (2021). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus Wisata Kebun Teh Nglinggo). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No.2
- Pokdarwis Wukirsari. (2022). *Profil Kelompok Sadar Wisata Wukirsari (Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta
- Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. (2001). *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi
- Sedamaryanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Shintani, A. (2020). Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Sei. Gohong. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9, 28–37
- Tim Pengelola Desa Wisata Wukirsari. (2019). *Profil Desa Wisata Wukirsari (Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata di Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta.
- Torang, S. (2013). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan)*.
- Utami, Dkk. (2021). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Sujukan, Kabupaten Semarang. *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3). <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Yuri Aditya, Ginung. 2019. Relasi Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Collaborative Governance : Pengelolaan Desa Wisata Wukirsari di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantu Daerah Iswimewa Yogyakarta

Identitas Informan :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Pertanyaan

A. Mengenai Desa Wisata Wukirsari

1. Bagaimana Arah pembangunan pada Desa Wisata Wukirsari?
2. Sejak Kapan Desa Wisata Wukirsari terbentuk?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan Desa Wukirsari dijadikan sebagai suatu Desa Wisata?
4. Dalam kebijakan pembentukan Desa Wisata Wukirsari apakah masyarakat dilibatkan?
5. Hal-hal menarik seperti apa yang ada pada Desa Wukirsari, sehingga ditetapkan sebagai desa wisata?
6. Obyek wisata seperti apa yang tersedia di Desa Wisata Wukirsari?
7. Bagaimana pengemasan paket wisata yang ada pada Desa Wisata Wukirsari?
8. Dengan adanya Desa Wisata Wukirsari ini apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera?

9. Dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari, apakah masyarakat berperan aktif ?
10. Bagaimana Sejarah pengelolaan Kalurahan Wukirsari sebelum dan sesudah menjadi desa wisata?
11. Inovasi seperti apa yang telah dilakukan untuk mengembangkan Desa Wisata Wukirsari?
12. Fasilitas apa saja yang sudah tersedia untuk menunjang pengelolaan Desa Wisata Wukirsari?
13. Bagaimana tingkat kunjungan wisatawan dari awal berdirinya Desa Wisata Wukirsari?
14. Apakah masyarakat dilibatkan dalam meningkatkan jumlah wisatawan di Desa Wisata Wukirsari?
15. Kendala seperti apa yang di apa yang di alami selama terbentuknya Desa Wisata Wukirsari?
16. Mengapa Pengelolaan Desa Wisata Wukirsari harus berfokus kepada kepentingan Publik?
17. Bagaimana mengarahkan kebijakan tersebut pada kepentingan publik?
18. Mengapa pada desa wisata, desa sebagai subyek pada pengelolaan desa wisata itu penting? Deskripsi kan secara mendalam.
19. Mengapa kewenangan desa pada pengelolaan suatu desa wisata itu menjadi hal yang penting?
20. Mengapa kebijakan mengenai suatu desa wisata sering kali hanya menjadikan desa sebagai obyek dari kebijakan tersebut?

B. Proses *Collaborative Governance*

1. Bagaimana proses pertemuan awal untuk membentuk kolaborasi antara aktor ini?
2. Dalam berjalannya kolaborasi ini bagaimana komitmen setiap aktor yang berperan dalam pengelolaan Desa Wisata Wukirsari ini?
3. dalam suatu kolaborasi diperlukan rasa saling percaya. Bagaimana cara dalam membangun rasa percaya setiap aktor?
4. bagaimana setiap aktor dalam membangun atau berbagi pemahaman?
5. Hasil seperti apa yang sudah tercapai selama proses kolaborasi ini berlangsung?

Lampiran 2.1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971. 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 133/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Gideon Pawa Salombe

No. Mahasiswa : 19520145

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022

Judul Proposal : Kolaborasi Governance Pengelolaan Obyek Wisata "Ledok Sambi" Di Kalurahan Pakeminangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman DIY

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

Lampiran 2.2. Surat Permohonan Izin Penelitian

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

Alamat : Jl. Timur No. 317 Yogyakarta 55238, Telp. (0274) 581871, 882775, Fax. (0274) 8119888, website : www.apmd.ac.id ; e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 068/I/I/2023
Hal : Permohonan izin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 17 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama	:	Gideon Pawa Salome
No Mhs	:	19520145
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Collaborative Governance: Pengelolaan Desa Wisata "Wukirsari" di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat	:	Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing	:	Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Januari 2023
Ketua



Lampiran 2.3 Surat Tugas Penelitian

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

SURAT TUGAS
Nomor : 034/L/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama	:	Gideon Pawa Salome
Nomor Mahasiswa	:	19520145
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan.
Jenjang	:	Sarjana (S-1).
Keperluan	:	Melaksanakan Penelitian.
a.	Tempat	: Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
b.	Sasaran	: Collaborative Governance: Pengelolaan Desa Wisata "Wukirsari" di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
c.	Waktu	: 17 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Ketua


Dr. Sugro Eko Yunanto
170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 2.4. Surat Ijin Penelitian Kaluraha



Lampiran 3. Dokumentasi



Wawancara bersama dengan Jagabaya Wukirsari Pak Ferry pada, 8 Februari 2023



Wawancara bersama Pak Pardi sebagai pengurus Paguyuban Wayang Wukirsari pada, 14 Februari 2023



Wawancara bersama Anggota BPD sekaligus Sekertaris Pokdarwis Wukirsari pada, 14 Februari 2023



Wawancara Bersama Ketua Pokdarwis Pak Jazir Hamid pada, 14 februari 2023



Wawancara Bersama Pengurus Paguyuban Batik Giriloyo Bu Hiptiah pada, 17 Februari 2023



Wawancara Bersama pengurus Paguyuban Batik Giriloyo Bu Nini pada, 14 Februari 2023



Wawancara Bersama Pengurus Paguyuban Batik Wukirsari Bu Sekar pada, 14 Februari 2023



Wawancara Bersama Mas Patrik masyarakat petugas parkir di Destinasi Wisata pada, 17 Februari 2023



Wawancara bersama Bu Suratin yang memiliki usaha UMKM di salah satu destinasi wisata pada, 17 Februari 2023



Wawancara bersama Pak Rachmad Pasa Lisyanto, S.TP selaku *Carik* Kalurahan Wukirsari pada, 25 Mei 2023.